

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH TERHADAP LAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SIDOARJO

Rizma Aulia¹, Keyza Zana Sabitha Zayyan², Eva Hany Fanida³, Melda Fadiyah Hidayat⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Surabaya

Email : 25040674273@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674267@mhs.unesa.ac.id²,
evafanida@unesa.ac.id³, meldahidayat@unesa.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pengeluaran anggaran daerah berpengaruh terhadap peningkatan mutu layanan publik di Kabupaten Sidoarjo, khususnya yang berkaitan dengan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan yang dipakai adalah kajian pustaka dengan memanfaatkan data sekunder yang mencakup laporan realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 dan informasi resmi dari otoritas daerah. Temuan studi menunjukkan bahwa total anggaran untuk Sekretariat DPRD mencapai Rp 97.922.607.964, dengan realisasi sampai September 2025 sekitar Rp 55,8 miliar atau 57% dari alokasi yang telah menunjukkan bahwa penyerapan anggaran masih kurang efektif, yang berpotensi berdampak pada kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pengelolaan anggaran guna memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap mutu layanan publik.

Kata Kunci: Pengeluaran Anggaran Daerah, Efektivitas, Layanan Publik, DPRD, Sidoarjo.

Abstract

This research aims to assess the extent to which regional budget expenditure affects the improvement of the quality of public services in Sidoarjo Regency, especially those related to the budget of the Sidoarjo Regency DPRD Secretariat. The approach used is a literature review by utilising secondary data that includes the 2025 Sidoarjo Regency APBD realisation report and official information from regional authorities. The findings of the study show that the total budget for the DPRD Secretariat reaches Rp97. 922,607,964, with realisation until September 2025 around Rp55,8 billion or 57% of the predetermined allocation. This shows that budget absorption is still less effective, which has the potential to impact the quality of public services. Therefore, it is important to increase the efficiency and optimisation of budget management to have a more significant impact on the quality of public services.

Keywords: *Regional Budget Expenditure, Effectiveness, Public Service, DPRD, Sidoarjo.*

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang

digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan serta penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Di dalam APBD terdapat beberapa komponen penting,

yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, belanja daerah atau pengeluaran anggaran memiliki peranan yang sangat penting karena digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di Kabupaten Sidoarjo, pengelolaan anggaran daerah dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif daerah, yaitu DPRD Kabupaten Sidoarjo. DPRD berperan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, termasuk dalam proses pembahasan serta persetujuan terhadap APBD. Dalam penyusunan maupun perubahan anggaran daerah, DPRD bersama pemerintah daerah secara berkala mengadakan rapat paripurna untuk membahas kebijakan fiskal daerah. Salah satu kegiatan tersebut adalah rapat paripurna yang membahas penyampaian nota penjelasan Bupati Sidoarjo mengenai Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Pada rapat tersebut disampaikan bahwa pendapatan daerah yang sebelumnya sebesar Rp5,428 triliun

meningkat menjadi sekitar Rp5,431 triliun, sementara belanja daerah juga mengalami peningkatan dari sekitar Rp5,94 triliun menjadi Rp8,043 triliun (DPRD Sidoarjo, 2025). Kenaikan anggaran tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan serta penyediaan layanan publik. Meskipun demikian, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dilihat dari besarnya jumlah anggaran yang dimiliki, tetapi juga dari seberapa efektif anggaran tersebut dimanfaatkan dalam menunjang pelayanan publik bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengeluaran anggaran daerah terhadap pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo dengan fokus pada penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode tersebut dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti laporan pemerintah daerah, dokumen anggaran, serta publikasi berita resmi yang

membahas kebijakan keuangan daerah. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 serta publikasi berita resmi DPRD Kabupaten Sidoarjo mengenai pembahasan perubahan APBD dan rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif guna melihat tingkat efektivitas penggunaan anggaran daerah dalam menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

keuangan daerah, terutama dalam mendukung peningkatan pelayanan publik. Di Kabupaten Sidoarjo, Sekretariat DPRD memainkan peran penting sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administratif untuk pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran oleh DPRD. Merujuk pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2025 hingga bulan September, alokasi anggaran untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tercatat sebesar Rp 97.922.607.964, dengan realisasi anggaran yang telah dicapai sekitar Rp 55.800.000.000 atau 57% dari total anggaran yang ada.

**Tabel 1. Realisasi Anggaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2025 (s.d. September)**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	Total Anggaran	97.922.607.964	100%
2.	Realisasi Anggaran	55.800.000.000	57%
3.	Sisa Anggaran	42.122.607.964	43%

Berdasarkan Tabel 1, tingkat realisasi pengeluaran anggaran daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo masih tercatat pada 57%, yang mencerminkan bahwa serapan anggaran belum efektif. Dengan waktu pelaksanaan yang sudah memasuki triwulan ketiga, seharusnya penyerapan anggaran sudah hampir mencapai target yang ditetapkan agar semua program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Rendahnya persentase realisasi anggaran ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD belum sepenuhnya berjalan dengan efisien. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai aspek, seperti keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas, administrasi yang masih belum optimal, serta perencanaan anggaran yang mungkin

belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan. Selain itu, adanya penyesuaian kebijakan atau perubahan prioritas alokasi anggaran turut berpengaruh terhadap tingkat penyerapan dana.

Dari segi penggunaan anggaran, pengeluaran di Sekretariat DPRD umumnya dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional, seperti gaji pegawai dan belanja barang serta jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat, pembuatan kebijakan, serta pembinaan fungsi DPRD. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran anggaran lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan rutin organisasi dibandingkan dengan pengembangan kapasitas lembaga. Terkait dengan layanan publik, efektivitas pengeluaran anggaran daerah berkaitan erat dengan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sekretariat DPRD berfungsi dalam mendukung kelancaran kegiatan DPRD, termasuk dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat, menyusun kebijakan daerah, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah daerah. Oleh karena itu, jika alokasi anggaran tidak terserap dengan maksimal, hal ini dapat berpengaruh pada kinerja DPRD dalam menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, efektivitas pengeluaran anggaran daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo perlu ditingkatkan. Langkah-langkah untuk mengoptimalkan serapan anggaran, memperbaiki efisiensi proses administrasi, dan perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran sangat penting agar setiap alokasi dalam APBD dapat digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Sidoarjo.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengeluaran dari anggaran daerah sangat penting untuk membantu berjalannya pemerintahan dan meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Kabupaten Sidoarjo sampai bulan September 2025, anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo adalah Rp 97.922.607.964, dengan realisasi mencapai sekitar Rp 55,8 miliar atau sekitar 57% dari total anggaran yang tersedia. Realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa dana daerah sudah digunakan untuk membantu tugas DPRD dalam bidang membuat UU, mengawasi dan menyusun anggaran. Namun, tingkat penyerapan anggaran masih hanya sekitar 57% , yang menunjukkan bahwa

penggunaan anggaran daerah belum cukup efektif, sehingga bisa menghambat upaya meningkatkan kualitas layanan publik secara maksimal. Perencanaan anggaran harus dibuat dengan memperhatikan hasil dan dampaknya terhadap pelayanan publik agar uang yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang nyata. Pemantauan dan pengevaluasian penggunaan dana harus dilakukan secara rutin dengan tujuan yang jelas agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Proses administrasi dan pengadaan harus dipercepat dengan menerapkan pendekatan sistem digital untuk mengurangi hambatan birokrasi. Fungsi pengawasan DPRD harus ditingkatkan dengan fokus pada peningkatan kinerja dan dampak dari penggunaan anggaran, bukan hanya pada kepatuhan administratif saja. Selain itu, evaluasi program berbasis output layanan publik perlu diterapkan agar setiap penggunaan anggaran dapat diukur kontribusinya secara langsung terhadap masyarakat. Dengan langkah-langkah itu, diharapkan efektivitas penggunaan dana daerah bisa meningkat dan memberikan dampak lebih baik terhadap kualitas layanan publik di Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ta'zhiyah, A., & Ardini, L. (2024). Analisis Kinerja Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*.
<https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2560>
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2025). Realisasi APBD Januari–September 2025 Kabupaten Sidoarjo.
<https://drive.google.com/file/d/14MmCiy5bM1bpxzdi0CEe7E1fCLE3g8uZ/view?usp=drivesdk>
- Delpia, V. (2023). Analisis Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Kualitas Keuangan Daerah. *Karimahtauhid*, 2(5).
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9049>
- Sastryawanto, H. (2017). Kajian Penguatan Anggaran Kecamatan dalam Rangka Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*.
<https://doi.org/10.30742/jisa1722017386>
- Sunatar, B., & SN, A. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sorong

- Tahun Anggaran 2013–2018. Institut Agama Islam Negeri Sorong.
<https://doi.org/10.47945/at-thariqah.v1i2.1276>
- Mushafi. (2022). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Kajian Hukum.
<https://doi.org/10.33650/laj.v1i1.2022>
- Purnamasari, D., & Rodiyah, I. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010–2014. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
<https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.814>
- Niki, D. Y., Ngutra, R. N., & Kambuaya, Q. F. (2024). Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Waropen. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 19(1), 78–84.
<https://doi.org/10.52062/jaked.v19i1.4079>
- Parsaulian, B. (2024). Financial Inclusion dan Stabilitas Keuangan di Indonesia. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*.
<https://doi.org/10.52300/jemba.v2i1.4213>
- Hertanto, Y., Domai, T., & Amin, F. (2017). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Blitar). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)*, 2(1).
<https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1424>
- Jundia, H. S., & Sarwono, A. E. (2023). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018–2022. *Jurnal Maneksi*, 12(3), 675–681.
<https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1738>
- Tuding, D. S. (2016). Kapasitas Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*.
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.2>